



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

## SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti  
Oral Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

**NUR ANNISA ALHADID**

**NIM: 11775201711**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : NUR ANNISA ALHADID  
 NIM : 11775201711  
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH (BPBD) PROVINSI RIAU

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Rony Java, S.Sos, M.Si**  
 NIK. 130 717 060

**Dekan**

**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**Ketua Program Studi**

**Ilmu Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NUR ANNISA ALHADID  
 NIM : 11775201711  
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH (BPBD) PROVINSI RIAU  
 HARI/TANGGAL UJIAN : SENIN, 22 NOVEMBER 2021

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA**

**Jhon Afrizal, S.H.I., M.A**

**NIP. 19790911 201101 1 003**

**ANGGOTA**

**PENGUJI I**

**Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP**

**NIP. 19810505 200604 2 006**

**PENGUJI II**

**Devi Deswimar, S.Sos., M.Si**

**NIK. 130411027**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Annisa Alhadid  
NIM : 11775201711  
Tempat/Tgl. Lahir : Kumpulan, 25 Maret 1997  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru , 09 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



**NUR ANNISA ALHADID**  
11775201711



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**  
**ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH PROVINSI RIAU**

**OLEH:**

**NUR ANNISA ALHADID**  
**NIM 11775201711**

*Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. Penelitian ini dilator belakangi oleh Provinsi Riau yang merupakan daerah yang rawan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, 2) Untuk menganalisis faktor apa saja yang menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan indikator dari peraturan mengenai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BPBD Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau belum sepenuhnya tercapai. Adapun yang menjadi penghambat dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yaitu: BPBD dalam penanggulangan bencana kekurangan personil dilapangan, BPBD memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, BPBD memiliki keterbatasan anggaran dan peralatan dalam menanggulangi bencana.*

**Kata Kunci: Kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanallahu wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah subhanahu wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis yakni, abak dan mamak tercinta, serta abang dan uni yang telah mendoakan maupun memberikan semangat, dukungan moril maupun materil serta senantiasa mendoakan penulis sehingga lancar dalam menyelesaikan Skripsi dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku rektor UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara.
5. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.
6. Bapak Muamar Alkadafi, S.sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA).
7. Bapak Rony Jaya, S.sos, M.Si selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas



Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

9. Untuk Bapak/ibu di kantor BPBD Riau yang telah memberikan kemudahan dalam penelitian ini.
10. Untuk Sahabat terbaik Nadya Mayolan, Batrisya Dwinda T, Widya Dini Putri dan Sahabat OCT terimakasih atas dukungannya.
11. Teman-teman kos Yesica Herdepsa, Risa Permata Sari, Nopita Sari, Shinta Indah Melani, Ismi Fitri Adriani dan Nadatul Marwah yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teman-teman jurusan Administrasi Negara kelas D angkatan 2017 yang sama- sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-Teman seperjuangan yaitu Iffandry Anwar, Nur Hafiza Afni, Jazmarita, yang senantiasa membantu dan menjadi teman curhat yang selalu menemani penulis, memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Nur Annisa Alhadid

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI I</b>	
2.1 Pengertian Kinerja .....	15
2.2 Konsep Kinerja Organisasi .....	19
2.3 Pengukuran Kinerja Organisasi .....	21
2.4 Penanggulangan Bencana .....	26
2.5 Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 7 Tahun 2019 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau .....	31
2.6 Penelitian Terdahulu .....	33
2.7 Pandangan Islam .....	37
2.8 Defenisi Konsep .....	37
2.9 Kerangka Berfikir .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.4 Informasi Penelitian .....	43
3.5 Metode Analisis .....	44





**BAB IV GAMBARAN UMUM**

4.1 Sejarah dan Dasar Hukum BPBD Provinsi Riau .....	46
4.2 Visi dan Misi BPBD Provinsi Riau .....	50
4.3 Tujuan dan Sasaran .....	51
4.4 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau .....	51
4.5 Sumber Daya BPBD .....	56

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau .....	59
5.2 Faktor-faktor yang Menghambat Kinerja .....	89

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	93
6.2 Saran .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Keadaan Aparatur Sipil Negara .....	4
Tabel 1.2	Data jumlah luas lahan terbakar .....	6
Tabel 1.3	Data Jumlah Titik Api Karhutla .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	39
Tabel 4.1	Aparatur Sipil NNegara (ASN) BPBD Provinsi Riau Brdasarkan Golongan Ruang Gaji jabatan .....	56
Tabel 4.2	Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD berdasarkan jabatan .....	57
Tabel 4.3	Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	57
Tabel 4.4	Data keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau berdasarkan pendidikan perjenjangan .....	58
Tabel 5.1	Sarana dan Prasarana .....	64
Tabel 5.2	Data Jumlah Titik Api Karhutla Provinsi Riau pada tahun 2017-2020 .....	68
Tabel 5.3	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	75
Tabel 5.4	Capaian Kinerja 2018 .....	77
Tabel 5.5	Perbandingan Pencapaian Kinerja Target dan Realisasi 2018 .....	78
Tabel 5.6	Pencapaian Kinerja 2019 .....	78
Tabel 5.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja Target dan Realisasi 2019 .....	79
Tabel 5.8	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Realisasi Anggaran 2018 .....	83
Tabel 5.9	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Realisasi Anggaran 2019 .....	84

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	55
Gambar 5.1 Peta Rawan Bencana .....	67



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ratusan juta penduduk dan banyak pulau yang tersebar dari ujung barat yaitu Sabang sampai ujung timur yaitu Merauke. Letak Indonesia berada di antara pertemuan 2 lempeng Samudera yaitu lempeng Samudera pasifik dan Samudera Hindia, dan diantar 2 lempeng Benua yaitu Benua Asia dan Australia. Secara geologi, geofisika, dan oseanografi serta posisi tengah yang dilintasi oleh poros utama bumi yakni khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim yang berbeda yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara letak geografis, Indonesia berpotensi cukup tinggi terhadap terjadinya sebuah bencana alam.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendefenisikan “bencana sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana yaitu dengan pencegahan bencana. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Penyelenggaraan

penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana mempunyai tujuan melindungi masyarakat dari bencana alam dan melindungi dari dampak yang ditimbulkan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu, suatu lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB merupakan lembaga non departemen setingkat menteri sebagaimana diatur oleh Pasal 10 Undang-undang Negara Republik Indonesia 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana penanggulangan. Dan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah-daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan satuan koordinasi pelaksanaan penanganan bencana (Satkorlak) ditingkat Provinsi dan satuan pelaksanaan penanganan bencana (Satlak PB) ditingkat Kabupaten/Kota).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Maka Pemerintah Riau membentuk Badan Penanggulangan



Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas dukungan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar tugas yang dibebankannya dapat terlaksana dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau memiliki 57 orang Aparatur Sipil Negara terdapat 16 orang, berpendidikan Sarjana terdapat 28 orang, pendidikan Diploma 2 sebanyak 4 orang, pendidikan SLTA 8 orang, kemudian sisanya pendidikan SLTP 1 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau memiliki 57 Aparatur Sipil Negara yang memiliki penilaian kinerja yang “Cukup Baik”. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal**

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Starata2 (S-2)	14	2	16
2	Starata 1 (S-1)	23	5	28
3	Diploma 3	3	1	4
4	SLTA/SMK	7	1	8
5	SLTP/SMP	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>	<b>9</b>	<b>57</b>

*Sumber:* Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau bertanggungjawab atas kebencanaan yang terjadi di Provinsi Riau. Jenis bencana yang sangat rentan terjadi di Provinsi Riau yaitu Kebakaran Hutan dan Lahan, Karena Provinsi Riau dikenal dengan Lahan gambut yang cukup luas. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “Tanggap Darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (Pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (Pasca Bencana) itu sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mempunyai sebuah Visi yaitu “*Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana*”. Selain BPBD Provinsi memiliki Visi yang disebutkan diatas BPBD juga mempunyai Slogan yaitu “*Riau Tanpa Asap*” bermaksud untuk merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga. Mengingat faktor timbulnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau, serta dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan maka sangatlah penting untuk mengetahui daerah-daerah yang





rawan terhadap titik api, guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Mengingat bahwa daerah Provinsi Riau terdapat 12 Kabupaten dan kota yang juga memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) adalah aktivitas untuk pencegahan dan pembatasan terhadap kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan tersebut. Kegiatan ini terdiri dari pencegahan, pemadaman serta penanganan pasca kebakaran (PP Nomor 45 Tahun 2004). Beberapa kegiatan ini saling berkaitan dan saling mendukung. Akan tetapi pengendalian kebakaran hutan itu sering terlihat sebagai kegiatan yang berjalan dengan baik, kemudian belum bisa memberikan hasil yang lebih baik. Adapun data mengenai luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau.

**Tabel 1.2 Data Jumlah Luas Lahan terbakar Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Wilayah	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	okt	Nov	des	Total
1	Rohul	-	-	-	-	-	-	2,5	13,5	6,5	9,5	-	-	32
2	Rohil	0,25	15	20,5	16	-	-	0,5	7,5	-	0,4	-	-	60,15
3	Dumai	24,6	26,7	53,55	6	-	5	2,25	20,35	-	0,5	-	-	138,95
4	Bengkalis	50,4	41,4	170,8	71	-	-	20	20,5	2	9,5	-	-	389,60
5	Meranti	4	26,5	7,5	3,2	-	-	0,5	2	0,5	-	-	-	44,20
6	Siak	63,92	45,43	55,71	0,34	-	1	1,25	6,42	0,5	-	-	-	174,56
7	Pekanbaru	3	3,5	7	1,5	-	-	0,41	1,5	2,5	5,25	-	-	24,66
8	Kampar	2,5	0,25	16,62	0,5	-	0,38	2,25	7,84	5,5	3	-	0,545	39,38
9	Pelalawan	4,5	0,5	71,6	2	0,5	12	6,25	35	4	0,25	3	-	145,60
10	Inhu	21,5	0,25	23,5	-	-	2	2	4,75	7,45	10,4	-	-	71,85
11	Inhil	14	88,1	133,5	48,4	-	10	157	24,5	4	2	-	-	481,5
12	Kuansing	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	1,5
<b>Total</b>		<b>188,67</b>	<b>247,63</b>	<b>560,28</b>	<b>148,94</b>	<b>0,5</b>	<b>30,38</b>	<b>194,91</b>	<b>143,86</b>	<b>34,45</b>	<b>40,8</b>	<b>3</b>	<b>0,545</b>	<b>1603,95</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 total perolehan luas lahan yang terbakar yaitu sebanyak 1603,95 dari total luas karhutla di kabupaten atau kota Provinsi Riau. Luas lahan terbakar yang terbesar pada bulan maret yaitu 560,28. Kabupaten yang memiliki luas karhutla pada tahun 2020 adalah Kabupaten Inhil yaitu 481,5 Luas Karhutla.





Diperingkat kedua dengan kabupaten luas karhutla terbanyak adalah kabupaten bengkalis dengan luas karhutla sebanyak 389,60. Yang paling sedikit luas kebakaran hutan dan lahannya terjadi pada Kabupaten Kuansing yaitu sebanyak 1,5 hektar. Provinsi Riau yang dikenal dengan hutan gambut yang sangat rentan terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau. Bahkan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau mengakibatkan terganggunya aktivitas penerbangan dan sebagian besar wilayah tertutup kabut asap.

**Tabel 1.3 Data Jumlah Titik Api Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau**

Tahun	Hotspot	Luas Areal Terbakar
2017	17,796.00	1,369.27
2018	1,512.00	5,776.46
2019	3,689.00	9,617.79
2020	650	1603,95

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2020

Terlihat dari table diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat Titik hotspot kebakaran hutan dan lahan 17,796.00 dan areal yang terbakar 1,369.27, pada tahun 2018-2019 persentase jumlah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mengalami peningkatan, tercatat yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yang mencapai titik 3,689.00 dan luas areal yang terbakar 9,617.79 hektar. Dan pada tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi namun tidak sebanyak pada tahun sebelumnya. Bahkan dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini dapat dirasakan.

Dari data wilayah yang sering terkena dampak bencana kebakaran hutan dan lahan diatas menggambarkan bahwa terdapat permasalahan terkait dengan

timbulnya atau terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Permasalahan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tampak semakin berat dan kompleks, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan *urgent* dari semua pemangku kepentingan. Dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut, kinerja organisasi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau sebagai koordinator dan lembaga yang berwenang dan betugas dibidang kebencanaan yang dituntut untuk bekerja secara optimal.

Kinerja yang baik yaitu, kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kinerja disetiap kegiatan individu merupakan kunci pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintah menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas bencana di Provinsi Riau, khususnya dalam Penanggulangan Bencana kebakaran hutan dan lahan. Setiap anggota organisasi, ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas. Maka dari itu dibutuhkan kinerja yang baik dari badan penanggulangan bencana daerah agar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau dapat ditanggulangi dengan cepat dan benar. Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat Nasional. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Provinsi Riau diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*).

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*Outcome*). Bila diperhatikan lagi, apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah *input* menjadi *output* (hasil kerja). Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 BPBD Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dalam penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dan pasca bencana dan meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibutuhkan peningkatkan peran dan kualitas pegawai BPBD Provinsi Riau untuk mencapai target pelaksanaan program kegiatan yang



telah direncanakan salah satunya Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dalam menyikapi isu ini badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Riau menjadi pelopor untuk pencegahan, menanggulangi dan pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat terlindungi dari ancaman bencana dan bisa meminimalisir resiko, sebab serta dampak dari bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih sangat terbatas dalam hal sarana prasarana serta kapasitas aparatur tanggap darurat bencana. Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Riau baik personil maupun relawan serta sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan BPBD berdasarkan tugas dan fungsinya.

Untuk menghadapi bencana tersebut BPBD memiliki peran langsung dalam menanggulangi bencana tersebut. Maka BPBD Riau mempunyai strategi upaya pengurangan resiko bencana (PRB) dengan indikator sasaran penurunan jumlah titik api. Oleh karena itu BPBD sebagai Badan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi bencana terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dari BPBD Riau. Sehingga kinerja BPBD Riau masih belum maksimal dalam menanggulangi bencana yang terjadi disetiap tahunnya. Selain dari permasalahan diatas dalam menghadapi bencana kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada di BPBD sehingga dalam pelaksanaan tugas masih kekurangan personil dan tenaga relawan dalam menghadapi bencana.

Selain itu, identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi yang penulis baca melalui revisi Rencana Strategi (Renstra) BPBD itu sendiri, fenomena lain yang



menjadi kendala dalam menanggulangi bencana Karhutla adalah masalah anggaran dan sarana prasarana. program kegiatan yang akan dilakukan karena terhalang oleh anggaran. fasilitas penunjang sarana dan prasarana BPBD dalam penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek masa umur peralatan dan peralatan penanggulangan bencana terbatas karena pagu anggaran dalam pembelian peralatan. Fenomena selanjutnya mengenai anggaran karena keuangan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul mengenai **“ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU.**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau ?
2. Faktor apa saja yang menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:



1. Untuk menjelaskan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau.
2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan dan memperluas bahan berfikir ilmiah. Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara.

###### b. Bagi Instansi

Penelitian ini untuk meningkatkan kualitas layanan dan dapat menjadi masukan serta rekomendasi bagi instansi yang penulis jadikan objek penelitian.



c. Bagi Universitas

Penelitian ini untuk menambah koleksi atau referensi dan bahan bacaan bagu mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya dan mahasiswa UIN Suska Riau pada umumnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah sesuai dengan focus yang ingin dicapai maka dibuatlah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang deskripsi umum dari proposal yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian serta sistematika Penulisan Proposal.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi tentang teori yang memperkuat penulisan proposal. Bab ini berisikan uraian-uraian teori yang berupa pengertian dan defenisi, konsep, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, dan berisi penelitian terdahulu.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang tipe penelitian yang dipakai, yaitu penelitian kualitatif, pendekatan penelitian, dan variable penelitian, diantaranya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data.



#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Berisi tentang gambaran sejarah singkat dan karakteristik objek penelitian, aktivitas atau ruang lingkup kegiatan objek penelitian dan berisi gambaran bagan dan mekanisme kerja atau uraian tugas pada objek penelitian.

#### **BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi tentang kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran atau rekomendasi yang merupakan pernyataan dari peneliti tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah temuan penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Kinerja

Tujuan organisasi hanya dapat dicapai apabila organisasi tersebut dapat didukung oleh unit-unit kerja yang didalamnya terdapat baik buruknya output dari suatu organisasi dipengaruhi baik buruknya kinerja yang terjadi dalam organisasi tersebut. Menurut Sudarmayanti (2011:360) mendefinisikan kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui Diduga seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang untuk mencapainya).

Menurut (Suwatno, 2014:196) kinerja merupakan *Performance* atau unjuk kerja. Kinerja dapat diartikan sebagai kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja, August W. Smith menyatakan bahwa "*Performance is output derives from processes, human otherwise,*" Kinerja merupakan penilaian kinerja atau prestasi kerja sebagai suatu kesuksesan yang dihasilkan seseorang, target atau sasaran atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja dapat ditinjau dari beberapa dimensi yaitu:

1. Sebagai keluaran (output) yaitu melihat apa yang dihasilkan.
2. Proses, yaitu prosedur-prosedur yang telah ditempuh dinilai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya.
3. Aspek konstektual, yaitu penilaian kerja yang dilihat dari kemampuannya.

(dalam Arsyad, 2004:20)

Menurut Viethzal (2004:309) kinerja merupakan fungsi dari motivasi, dan kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki kemauan dan kemampuan tertentu. Keinginan dan keterampilan seseorang tidak dapat melakukan sesuatu secara efektif dan tidak dapat mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kinerja merupakan pelaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam organisasi.

Menurut Sudarmayanti (2003:147) kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Mangkunegara (2004) menyatakan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Menurut Nawawi (2000:396) kinerja merupakan proses organisasi dalam melakukan penilaian terhadap pegawai atau karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja antara satu karyawan dengan karyawan berkerja pada tempat yang sama produktifitas mereka tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan kinerja itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu : faktor individu dan situasi kerja.

Sedangkan menurut Ruky (2004:33) kinerja (prestasi kerja ) adalah kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil, yang dihubungkan dengan misi yang



diemban oleh suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan yang diambil.

Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi serta organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Martono, 2010). Pengertian lain mengatakan bahwa kinerja merupakan gabungan dari 3 (tiga) faktor yang terdiri dari:

1. Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dalam bekerja. Faktor ini mencakup jenis pendidikan serta pelatihan yang pernah diikuti dibidangnya.
2. Pengalaman. Yakni: tidak sekedar berarti jumlah waktu atau lamanya dalam bekerja, tetapi berkenaan dengan substansi yang dikerjakan jika dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu.
3. Kepribadian, berupa kondisi didalam diri seseorang dalam bekerjasama atau keterbukaan, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja dan sikap terhadap pekerjaan. Sedangkan Nawawi dalam Widodo (2015:131) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan, baik berupa fisik atau material maupun non fisik atau non material. Menurut Simanjuntak dalam Widodo (2015:131) kinerja merupakan tingkatan pencapaian hasil atas tugas tertentu yang dilaksanakan.



Pengertian kinerja, dari berbagai pendapat diatas, pada dasarnya menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*outcome*). Apa yang terjadi dalam pekerjaan atau jabatan, bila disimak lebih lanjut merupakan suatu proses yang mengelola input menjadi *output* (hasil kerja), maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja dalam penelitian ini adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi menurut (Robert L. Mathis and Jhon H. Jackson, 2001:82) adalah:

1. Kemampuan mereka,
2. Motivasi
3. Dukungan yang diterima
4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
5. Hubungan mereka dengan organisasi.

Menurut Mangkunegara (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kemampuan

Secara umum kemampuan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*Knowledge dan skill*) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang



diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

## 2. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seroang pekerja dalam menghadapi situasi. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Menurut Mahmudi (2010:10) kinerja merupakan suatu konstruk multideminisional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhi.

## 2.2 Konsep Kinerja Organisasi

Organisasi dalam bahasa inggris yaitu *Organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungan antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Sedangkan, menurut Hasibuan (2006:120), mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, terstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah.

Mahsun (2006:01) memberikan pendapat tentang konsep organisasi, bahwa organisasi sering dipahami sebagai kelompok yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Sementara itu, menurut Robbins (2004:04) mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai tujuan.



Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Adapun sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia, non fisik seperti peraturan, informasi dan kebijakan. Menurut M. Mahsun (2006) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi.

Simanjuntak (2005:3) mengemukakan bahwa kinerja organisasi merupakan agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di organisasi tersebut. Dengan demikian kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan organisasi, kemampuan manajemen dan kinerja setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi antara lain dalam penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi dan penyediaan prasarana serta sarana kerja.

Sementara itu, Surjadi (2009:07) berpendapat bahwa kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, dengan tercapainya tujuan organisasi tersebut maka kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sobandi (2006:176) kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah



dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terikat dengan *input, output, outcome, benefit* maupun *impact* dengan tanggungjawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggungjawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuan yang sudah tercapai atau belum.

### 2.3 Pengukuran Kinerja Organisasi

Menurut Mahsun (2013), pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sedangkan menurut Wibowo (2016), pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja bukan tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu kita apa yang telah terjadi bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator kinerja menurut Mahsun(2013 : 71) adalah sebagai berikut:

1) Masukan (input)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana atrategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan lembaga-lembaga yang relevan.

2) Proses (proces)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan.

3) Keluaran (output)

Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator atau





tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai lingkup dan sifat kegiatan instansi.

#### 4) Hasil (outcomes)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu hasil kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

#### 5) Manfaat

Manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah



beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

#### 6) Dampak (impact)

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Indikator kinerja digunakan sebagai gambaran capaian suatu organisasi dan sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Agus Dwiyanto (2008:50) adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

##### 1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

##### 2. Kualitas layanan

Banyak pandangan negative mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima.

##### 3. Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



#### 4. Responsibilitas

Menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan prinsip-prinsip organisasi yang benar dengan kebijakan organisasi.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Hal ini lebih ditekankan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten pada aspirasi dan kehendak rakyat.

Pada pelaksanaan kegiatan atau program untuk mencapai suatu keberhasilan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi tersebut. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam dan luar organisasi, berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi menurut para ahli. Menurut Soesilo Dalam (Tangkilisan, 2005:108), kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

1. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
2. Kebijakan pengelola, berupa visi dan misi organisasi.
3. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
4. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelola database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.



5. Sarana dan prasarana yang dimiliki berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Menurut Ruki dalam Tangkilisan (2005:180), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi, yaitu:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi.
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standart dan tujuan organisasi.
6. Pengelolaan sumber daya manusia meliputi aspek kompensasi, imbalan dan promosi.

#### **2.4 Penanggulangan Bencana**

Secara garis besar, upaya penanggulangan bencana meliputi: Kesiapsiagaan keadaan siap setiap saat bagi setiap orang, petugas serta institusi pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) untuk melakukan tindakan dan cara-cara menghadapi bencana baik sebelum, sedang, maupun sesudah



bencana. Penanggulangan adalah upaya untuk menanggulangi bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia, termasuk dampak kerusakan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tujuan dari upaya di atas ialah mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana; mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya; dan mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana.

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi potensi bencana yang frekuensinya terus menerus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Penanggulangan bencana ada tiga tahap yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Manajemen bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat. Penanganan atau penanggulangan bencana meliputi 3 fase yaitu fase sebelum terjadinya bencana, fase saat terjadinya bencana, dan fase sesudah kejadian bencana.

**Sebelum Bencana:** Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadi bencana. Meliputi kesiapsiagaan dan mitigasi. **Kesiapsiagaan:** Mencakup penyusunan rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil,



Mungkin juga merangkul langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang, Mitigasi: Mencakup semua langkah yang diambil untuk mengurangi skala bencana di masa mendatang, baik efek maupun kondisi rentan terhadap bahaya itu sendiri, Oleh karena itu kegiatan mitigasi lebih difokuskan pada bahaya itu sendiri atau unsur-unsur terkena ancaman tersebut. Contoh : pembangunan rumah tahan gempa, pembuatan irigasi air pada daerah yang kekeringan.

Saat Bencana (Tanggap darurat) Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Meliputi kegiatan: penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasca Bencana (Recovery) Penanggulangan pasca bencana meliputi dua tindakan utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi.

Sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utambah tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Prinsip-prinsip dalam penanggulabgan bencana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu:

- a. Cepat dan tepat, di Indonesia banyak sekali bencana, sudah sewajarnya kalau penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat karena jika tidak akan mengakibatkan lebih banyak korban dan lebih banyak kerugian.
- b. Prioritas, harus mengetahui mana yang menjadi prioritas dalam prosesnya, sudah tentu jika penyelamatan nyawa harus selalu didahulukan dibandingkan penyelamatan harta benda berdasarkan skala prioritas.
- c. Koordinasi dan keterpaduan, bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat harus mampu melakukan hubungan yang baik dan saling mendukung. Penanggulangan bencana harus mengusung keterpaduan dalam berbagai sektor.
- d. Berdaya guna dan berhasil guna, penanggulangan bencana bukan upaya yang sia-sia dan membuang waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar. Penangaan bencana harus berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan rasa trauma bencana yang terjadi.



- e. Transparansi dan akuntabilitas, transparansi bahwa segala bentuk penanggulangan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban secara terbuka dan sesuai dengan etika dan hukum.
- f. Kemitraan, tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut membantu. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mampu menjalin kemitraan yang baik.
- g. Pemberdayaan, merupakan bentuk peningkatan dan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran praktis terkait dengan langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana. umumnya langkah yang dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar mengenai bencana di kawan rawan bencana.
- h. Nondiskrimansi, adapun bentuk prinsip ini jelas bahwa tidak pembedaan suku, ras, agama dan budaya yang menjadikan proses penanganan bencana tidak seimbang antara satu dengan lainnya.
- i. Nonproletisi, maksudnya yaitu larangan pemanfaatan penanggulangan bencana sebagai upaya untuk meraih suatu bentuk kepentingan tertentu seperti cara pemberian bantuan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan lainnya.

Prinsip dasar upaya penanggulangan bencana dititik beratkan pada tahap kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. mengingat bahwa tindakan preventif (mencegah) lebih baik dari pada kuratif (penanganan). Bencana alam itu sendiri memang tidak dapat dicegah, namun dampak buruk akibat bencana dapat kita





cegah dengan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, seperti pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, pemulihan korban bencana serta pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal.
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

## **2.5 Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 7 Tahun 2019 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau**

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan kemudian diperkuat dengan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang pedoman dengan acuan dasar



hukum tersebut maka pemerintah Provinsi Riau membentuk organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu organisasi yang berorientasi dibidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau bertugas untuk menggantikan penanganan bencana di tingkat provinsi dan satuan pelaksana penanganan bencana (Satkorlak) dan satuan bencana ditingkat kab/kota, yang keduanya berdasarkan peraturan presiden nomor 8 tahun 2008, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa BPBD Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.



5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dari belanja daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori dan memahami metode dalam mengumpulkan maupun mengolah data hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan yaitu tentang analisis kinerja diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Irvan Indriyan, Dyah Hariani (Jurnal Administrasi Publik)	Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja BPBD serta faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi kinerja BPBD kota Semarang	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian





No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	Syahripul Yani (Skripsi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017)	Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir	hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir baik dilihat dari kemampuan (Ability) disini adalah mencakup pengetahuan dan skil dari pegawai, selanjutnya dilihat dari motivasi (Motivation) identik dengan sikap dan perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh pegawai beserta situasi kerja dalam organisasi, sebagian besar informan memberikan tanggapan kinerja yang dilakukan pegawai belum baik.	Penelitian ini menggunakan teori mangkunegara
3	Sinta Syafril, Dra. Susi Sulandari (Jurnal Administrasi Publik Universitas Diponegoro)	Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas kinerja dalam penanggulangan bencana banjir belum maksimal, karena masih terdapat program	Penelitian ini mengkaji tentang penanggulangan bencana banjir dan indikator yang di pakai mengenai produktivitas

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>atau kegiatan yang belum mencapai target di setiap tahapan bencana. Kualitas layanan dalam penanggulangan bencana banjir juga belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, tanggung jawab yang dilakukan belum maksimal, karena masih terdapat kendala, dan belum akuntabel dan transparansi kepada masyarakat</p>	<p>, kualitas layanan dan tanggung jawab</p>
4	Nur Khutimah Suri (Jurnal Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara)	Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo	Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi antar instansi daerah kurang efektif dalam penanganan bencana dan Sumber Dayanya juga kurang memadai untuk dapat cepat terselesainya masalah penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Sehingga kinerja BPBD Kabupaten Karo belum efektif dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung.	Perbedaan penelitian ini upaya dalam penanganan bencana erupsi gunung sinabung

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung, untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung.	
5	Ahmad Ansori	Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Siak	Adanya koordinasi seluruh elemen dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga tugas dan fungsi BPBD tidak hanya disibukan dengan menangani lahan saja tetapi bisa terus memberikan pendidikan dan pelatihan serta edukasi kepada masyarakat	Perbedaan penelitian ini terdapat pada indikator yang dipakai yaitu teori dari Moehariono



## 2.7 Pandangan Islam

Pandangan Islam Terhadap Kinerja Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kerja karena bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja keras secara positif (halal, baik, barokah dan tidak berbuat curang/zholim) sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup (kepuasan).

Kinerja dalam pandangan islam telah disinggung dalam Ayat-ayat Al-Quran. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 105, yaitu:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasil-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Sebagaimana Surat di atas menjelaskan tentang segala bentuk pekerjaan atau perbuatan bagi seorang muslim yang harus dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada allah semata-mata oleh karenanya segala aktifitas hidup dan kehidupan merupakan amal yang diperintahkan dalam islam.

## 2.8 Definisi Konsep

Defenisi konsep merupakan suatu hal yang abstrak dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan di generalisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep

yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau criteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
2. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, terstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah.
3. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman dengan kebijakan yang ditetapkan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub indikator
Pemendagri 46 Tahun 2008 mengenai pedoman dan tata kerja BPBD terkait dengan Tugas dan Fungsinya	Penetapan	1. Pedoman Penanggulangan Bencana, Pencegahan bencana, Penanganan darurat, Rehabilitasi 2. Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana
	Penyusunan	1. Penetapan Peta Rawan Bencana 2. Penetapan Prosedur Penanggulangan Bencana
	Pelaporan	1. Pelaporan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program badan
	Pengendalian	1. Mengendalikan pengumpulan penyaluran uang dan barang
	Tanggungjawab	1. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
	Pelaksanaan	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang bertindak secara cepat dan tepat, efektif dan efisien 2. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 mengenai pedoman dan tata kerja BPBD



## 2.9 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi merupakan faktor penting dalam penelitian. Inilah yang menjadi tempat dimana kita akan melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Nomor 438 Tanah Datar Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember sampai dengan selesai.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari responden atau narasumber sebagai hasil penelitian, yaitu dengan cara menyebarkan kusioner dan wawancara langsung kepada responden yang terpilih.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi bersangkutan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain mengenai :
  - a. Gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
  - b. Uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
  - c. Struktur Organisasi

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecah masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, prosedur pengumpulan data secara umum dalam penelitian adalah:

#### a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu ide topik tertentu. Penulis melakukan wawancara Tanya jawab langsung kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bagian Perencanaan serta Bidang Kepegawaian dan umum terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah recording.

#### b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan, serta berupa foto ataupun dokumentasi.





### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	KA. Subag Perencanaan	1
2	Kabid Kedaruratan	1
3	Kabid Rehabilitas dan Rekonstruksi	1
4	Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan	1
5	Staff Perencanaan	1
6	THL	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

**Sumber: Data Olahan 2020**

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informan* dilakukan dengan cara *Snowball*. Seperti yang dikemukakan oleh sugiyono (2010:85) bahwa, teknik dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Snowball* atau bola salju yaitu suatu teknik penentu sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. dalam penelitian metode ini pertama-tama dipilih salah satu atau dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti bisa mencari orang lain yang

dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

### 3.5 Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data penelitian yaitu: dengan mengikuti teknis analisis data kualitatif dengan konsep yang dikemukakan sugiyono (2005:60). Berikut ini ada beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data, yaitu:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data atau yang dikenal dengan kata mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi oleh peneliti dapat memberikan gambaran yang tepat dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian kualitatif adalah sebuah teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang telah diperoleh dari lapangan akan disajikan dalam bentuk teks tanpa adanya penambahan dari peneliti atau bersifat fakta. Hal ini dilakukan agar penyajian data dapat sesuai dengan data yang direduksi di lapangan.



c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah semua data terkumpul dengan baik oleh peneliti yang berkenaan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Serta data yang telah diperoleh dapat dikembangkan sesuai dengan kerangka pemikiran dan teori-teori yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah dan Dasar Hukum BPBD Provinsi Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu organisasi yang berorientasi di bidang penanggulangan Bencana. Terbentuknya BPBD dimulai pada tahun 2010 atas persetujuan Gubernur Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendapat izin dari BNPB pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 pada tanggal 5 Juni 2010, kemudian keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 9 Juni 1992. Atas dasar peraturan diatas maka BPBD dibentuk di Provinsi Riau sebagai upaya koordinasi dan tanggap darurat bencana yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan Provinsi Riau sangat rentan akan bencana terutama banjir, kebakaran, dan tanah longsor.

Adapun dasar hukum daerah melaksanakan implementasi fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menerangkan mengenai aturan pembangunan desentralisasi pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 membahas mengenai bantuan terhadap peningkatan pembangunan aparatur daerah dan lembaga diatur dalam pasal 1 ayat 7, meliputi bantuan terhadap korban bencana alam. Pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan. Pengembangan sarana prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian ibadah.



2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan pemerintah pusat dalam memabntu masyarakat yang menangani bidang penanggulangan bencana. Ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatuhan serta kewajaran, ayat 3 mengenai sanksi dan ayat 4 aturan lanjutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa “setiap penanaman modal kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.
4. Peraturan Kepala Badan Nasioanal Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang standarisasi data kebencanaan.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - a. Cepat dan tepat  
Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
  - b. Prioritas  
Prioritas merupakan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.



- c. **Koordinasi dan keterpaduan**  
 Koordinasi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- d. **Berdaya guna dan berhasil guna**  
 berdaya guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya yang berlebihan. Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.
- e. **Transparansi dan Akuntabilitas**  
 Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan secara etika dan hukum.
- f. **Kemitraan**  
 Kemitraan adalah bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
- g. **Pemberdayaan**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.

h. Non diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

i. Non politisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial perusahaan di Provinsi Riau.

7. Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011 tentang uraian tugas badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Riau; mencakup beberapa aspek berikut:

a. Menyediakan panduan mengenai tanggungjawab sosial kepada semua bantuan organisasi tanpa memperhatikan ukuran lokasi untuk: Prinsip dan isu: menyatukan, melaksanakan memajukan praktek tanggung jawab pemangku kepentingan; mengkomunikasikan komitmen dan performa.

b. Menyempurnakan/melengkapi instrumen inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial dan membantu kegiatan sosial yang dapat membangun rasa kemanusiaan.



- c. Mempromosikan terminologi umum dalam lingkup tanggungjawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggungjawab sosial.
- d. Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional standarisasi lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab sosial suatu organisasi.
- e. Prinsip ketaatan pada hukum/legal *compliance*, prinsip penghormatan instrument internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip penghormatan atas hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman.

#### 4.2 Visi dan Misi BPBD Provinsi Riau

Adapun visi dan misi BPBD Provinsi Riau yaitu:

##### 1. Visi

Terwujudnya Provinsi Riau yang tangguh dalam penanggulangan bencana.

##### 2. Misi

Visi ini diwujudkan dengan 4 misi penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana Provinsi Riau.
- b. Memperkuat masyarakat berbudaya melayu dengan kualitas layanan aman bencana.



- c. Melindungi segenap masyarakat Riau dari dampak bencana.
- d. Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana secara terpadu dan berkesinambungan.

### 4.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan:
  - a. meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
  - b. Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana
  - c. Terlaksananya fasilitas dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
  - d. Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - e. Terwujudnya masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana.

### 4.4 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggungjawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterikatan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembentukan organisasi dan pendelegasian wewenang serta tugas merupakan unsur utama dan juga merupakan alat untuk mencapai pengawasan yang baik.

Pengorganisasian berguna untuk mempersatukan orang-orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan



perusahaan harus ditentukan alat-alat mana yang sesuai, siapa pemegang kunci atau jabatan yang melakukannya dan setiap manajer memiliki wewenang untuk mengatur devisa masing-masing. Struktur Organisasi badan mencerminkan kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengadakan pengawasan terhadap manusia, peralatan dan fasilitas lainnya yang terlihat di dalamnya demi tercapainya tujuan. Seorang pimpinan perusahaan harus mempunyai pandangan luas, selain itu pimpinan harus tahu bagaimana mengatur organisasi, dan menentukan bagian-bagian yang tepat untuk diduduki oleh orang yang tepat.

Bentuk organisasi yang dianut juga mempengaruhi kebijaksanaan dalam mengorganisir bawahannya, karena itu didalam menetapkan suatu kebijakan terlebih dahulu harus ditetapkan bentuk organisasi yang akan diterapkan menyesuaikan susunan dan penempatan orang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian terdapat wewenang langsung antara setiap atasan dan bawahan. Ini berarti bahwa setiap manajer mempunyai wewenang sepenuhnya pada bawahannya, yang melapor hanya pada manajer tersebut, atau aliran wewenang langsung dan tidak langsung.

Struktur Organisasi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan guna untuk merumuskan suatu organisasi sehingga dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut. Untuk itu perlukan organisasi yang fleksibel dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri. Unsur-unsur organisasi yang ada di BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Badan

Tugas dan Tanggung Jawabnya adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup



pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi, dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

## 2. Unsur Pengarah

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
- b. Pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 3. Kepala Pelaksana

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Pengkoordinasian dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 4. Sekretariat

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integritas program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi penatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana



## 5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

## 6. Bidang Kedaruratan

Tugas dan tanggungjawabnya

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

## 7. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi

Tugas dan tanggungjawabnya

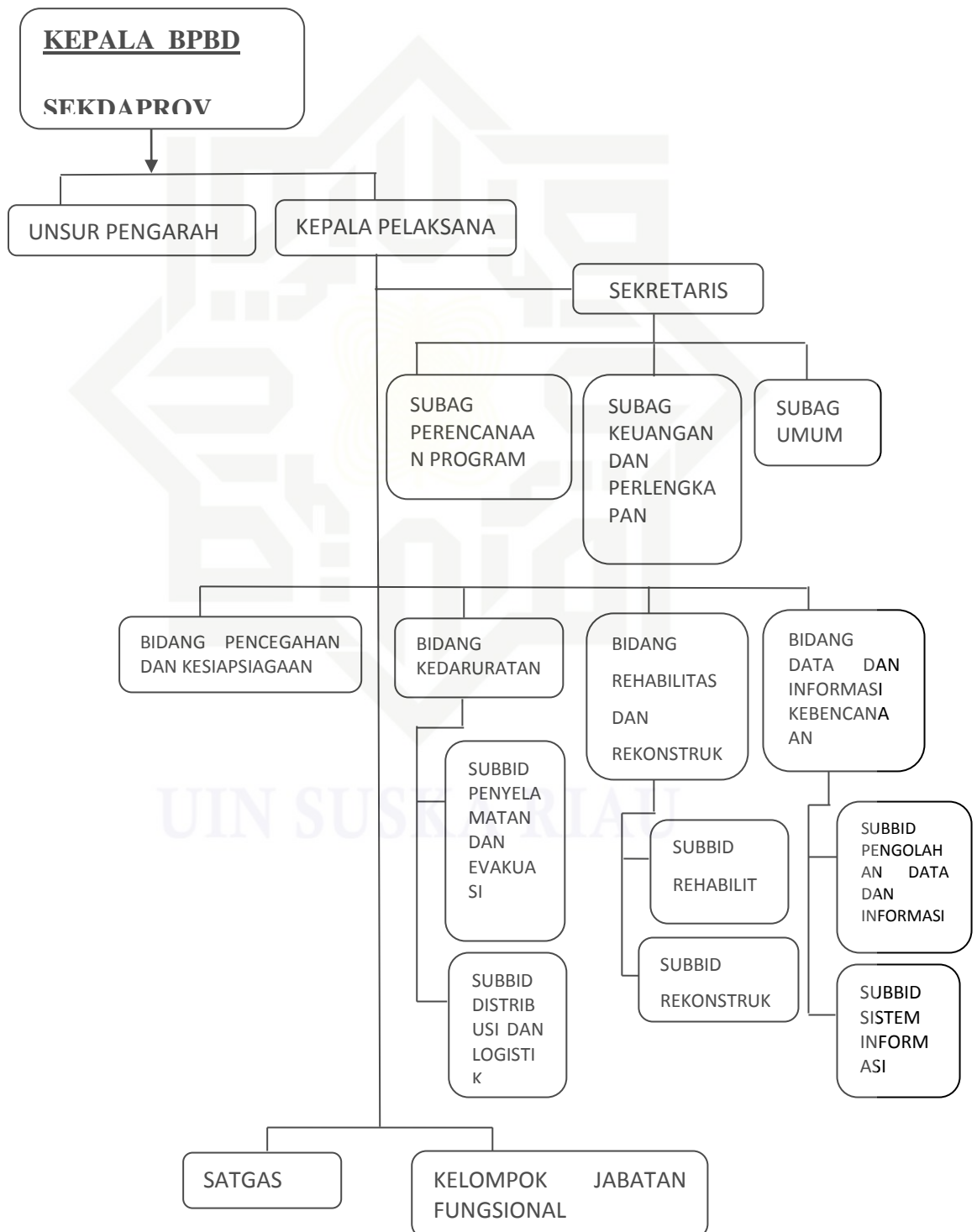
- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana





- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau**





#### 4.5 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Daya yang dimiliki baik individu maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebanyak 48 orang. Berikut ini data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau:

##### 1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

**Tabel 4.1**  
**Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Golongan Ruang Gaji**

No	Golongan Ruang Gaji	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Golongan IV	10	1	11	19,30
2	Golongan III	31	7	38	66,66
3	Golongan II	7	1	8	14,04
4	Golongan I	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>100</b>

*Sumber Data: Desember 2020*

Jika melihat pada tingkat Golongan Ruang Gaji aparatur BPBD Provinsi Riau, secara total berjumlah 57 orang dengan komposisi pegawai yang didominasi Golongan IV sebanyak 11 orang atau 19,30%, Golongan III sebanyak 38 orang atau 66,66%, sedangkan Golongan Ruang Gaji terkecil adalah Golongan II berjumlah 8 orang atau sekitar 14,04%.

##### 2. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan

Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau berjumlah 57 orang, berdasarkan jabatan terbagi dalam 4 kelompok.

**Tabel 4.2**  
**Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan/Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Eselon II	1	0	1	1,75
2.	Eselon III	5	0	5	8,78
3.	Eselon IV	11	0	11	19,30
4.	Fungsional	1	0	1	1,75
5.	Staf/Non Struktural	30	9	39	68,42
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>100</b>

*Sumber Data: Desember 2020*

Dari sejumlah 57 pegawai BPBD Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan Eselon II, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, 5 Orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari sekretaris dan 4 kepala bidang, serta 11 eselon IV, 1 orang fungsional dan sisanya adalah staf.

### 3. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.

Diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan BPBD Provinsi Riau didominasi oleh tingkat Strata I (S.1) yang berjumlah 22 orang atau 47,80%.

**Tabel 4.3**  
**Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Strata 2 (S-2)	14	2	16	28,07
2.	Strata 1 (S-1)	23	5	28	49,12
3.	Diploma	3	1	4	7,02
4.	SLTA/SMK/KPAA	7	1	8	14,04
5.	SLTP	1	0	1	1,75
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 57 orang Aparatur Sipil Negara



(ASN) terdapat 16 orang atau 28,07% berpendidikan sarjana starata 2, terdapat 26 orang atau 42,12% untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan sarjana strata 1, untuk yang berpendidikan Diploma 3 sebanyak 4 orang atau 7,02% sedangkan yang berpendidikan SMA/SMK terdapat 8 orang atau 14,04% sisanya 1 orang yang berpendidikan SMP atau 1,75%.

#### 4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan perjenjangan berjumlah 17 orang.

**Tabel 4.4**  
**Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Pendidikan Perjenjangan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Diklatpim IV	11
2	Diklatpim III	4
3	Diklatpim II	2
4	Diklatpim I	0
	Jumlah	17



## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka dapat diketahui bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal namun dikatakan sudah baik. Dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BPBD Riau dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan sasaran kinerja. Terdapat dalam Peraturan Dalam Negeri 46 Tahun 2008 tugas pokok dan fungsi BPBD diantaranya a) menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, secara adil dan setara, b) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, c) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, d) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, e) mengendalikan dan mengumpulkan penyaluran uang dan barang, f) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dari belanja daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau membuat program penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan indikator pengurangan resiko bencana (PRB), dari program penyelenggaraan. penanggulangan bencana ini mempunyai sasaran dan target yang ingin dicapai dari kinerja yang telah dilakukan. BPBD Riau juga telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat peta rawan bencana agar dapat mendeteksi daerah-daerah yang rawan terhadap bencana dan dapat diketahui medan jalan dan jarak terhadap lokasi terjadinya bencana. kinerja BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan penanggulangan bencana dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap personil maupun relawan, dalam penanggulangan bencana karhutla. Adapun faktor yang menghambat dalam kinerja badan penanggulangan bencana daerah di kantor BPBD Riau masih kekurangan personil dalam penanggulangan bencana karhutla. Dalam penanggulangan bencana BPBD mempunyai 20 orang personil yang turun kelapangan dengan luas wilayah yang cukup luas membuat kinerja BPBD jadi terhambat. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dibuat belum semuanya dapat dilaksanakan disemua daerah yang rawan bencana karena keterbatasan anggaran dan juga peralatan dalam penanggulangan bencana.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan data yang diperoleh ada beberapa saran yang kiranya dapat memberikan masukan kepada instansi yang terkait pada umumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih memperhatikan jumlah SDM yang dimiliki apakah sudah cukup atau perlu penambahan pegawai.
- b. Sebaiknya BPBD Riau juga melakukan monitoring secara mendadak untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja pegawai BPBD dalam menjalankan tugasnya masing-masing.



- c. BPBD Riau dapat memberi pelatihan dan pendidikan kepada semua agar pegawai bisa meningkatkan kualitas kerjanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Budiningsih Kushartati.(2017). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara*. Vol.14 No.2, Hal 165-186. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanandan *Bisnis*. Penerbit Bandung: Bandung.
- Efroza Andre. (2017). *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Alam*.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Organisasi dan Motivasi – Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutabarat, Jemsley dan Martani Huseini.(2006). *Manajemen Strategis Kontemporer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Khotimah Afifah Husnul dan Wardhana Aditya. (2018).*Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah*. Vol.5 No.2, Page 2732. e-Proceeding of Management.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : FE UGM.
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2004. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurjanah, dkk. 2013 *Manajemen Bencana* .Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia :Kinerja Organisasi Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta : BPFE
- Robbins, Stephen P. (2002). *Prinsip – Prinsip Perilaku Organisasi Edisi 5*. Jakarta : Erlangga.





Ramadani, Endah Mustika. 2015. *Koordinasi oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan dan Praktik Administrasi. Vol. XII Nomor 3

Sangadji, Dita Mamang dan Sopiah. Metodologi penelitian. Yogyakarta : AndiOffset

Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Kelima, PT Refika Aditama, Bandung

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Suwatno dan Donni Juni Priansa 2014, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik*

Syafitri, Sinta dan Susi Wulandari. *Analisis Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang*. Tesis. Jurusan Administrasi Publik Fakultas ISIP Universitas Diponegoro

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Depok : PT. Raja grafindoPersada.

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana  
Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang membentuk organisasi BPBD

Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPBD Provinsi Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa BPBD Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi.



# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU



Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 Dengan Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi yakni Bapak Drs. H. Dendi Zulhairi, M.Si



Wawancara Pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Kasubbag Perencanaan Program yakni Bapak Roy Sander, S,STP, M.Si.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan Bendahara pada Subbag Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni Bapak Yopan Samsul Choeru Zaman, ST



Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Kasubbag Kepegawaian dan Umum yakni Bapak Nanda Ikhsanul Rizqi, S.STP,M.Si.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2021 Pegawai THL di BPBD Provinsi Riau  
Yakni Bapak Asman Wahidi



Wawancara Pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan Kasubid Kesiapsiagaan yakni  
Bapak Naspi Yendri, SE,M.Si



## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Nur Annisa Alhadid, lahir di Kumpulan pada tanggal 25 Maret 1997. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara yaitu dari pasangan ayahanda Bustami dan ibunda Erma Yeni. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 15 Tabing (2004-2010). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bonjol (2010-2013). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bonjol (2013-2016). Pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Ujung Rajang Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Penulis melakukan penelitian ini di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dengan judul **“Analisi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau”**. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasah (Oral Comprehensive) pada tanggal 22 November 2021 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.